



PERAN ADMINISTRASI PUBLIK DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN DAERAH BERKELANJUTAN DI KECAMATAN TOILI, KABUPATEN BANGGAI

Budianto Taib¹, Istiqamah Bungana²

Ilmu Administrasi Negara¹, Ilmu Pemerintahan², Universitas Tompotika Luwuk

Email : taibbudianto80@gmail.com, istiqamahbungana2001@gmail.com

Abstrak

Pembangunan daerah berkelanjutan merupakan agenda strategis yang membutuhkan intervensi aktif dari instrumen administrasi publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran administrasi publik dalam mendukung pembangunan daerah berkelanjutan di Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, sebuah wilayah yang memiliki karakteristik ganda sebagai lumbung pangan (pertanian) sekaligus area potensial industri ekstraktif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui studi literatur, observasi, dan analisis dokumen kebijakan. Teori yang digunakan berfokus pada *New Public Service* (NPS) dan *Collaborative Governance*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa administrasi publik di Kecamatan Toili berperan krusial dalam tiga aspek utama: (1) regulasi dan penataan ruang yang menyeimbangkan antara perlindungan lahan pertanian berkelanjutan dengan ekspansi ekonomi, (2) pelayanan publik yang memberdayakan kelompok tani lokal, dan (3) fasilitasi kolaborasi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat. Namun demikian, kapasitas kelembagaan tingkat kecamatan dan tumpang tindih kebijakan di tingkat yang lebih tinggi masih menjadi tantangan utama. Disimpulkan bahwa penguatan kapasitas tata kelola lokal dan sinergi antar-pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di tingkat tapak.

Kata Kunci: *Administrasi Publik, Pembangunan Berkelanjutan, Tata Kelola Kolaboratif, Kecamatan Toili.*

Abstract

Sustainable regional development is a strategic agenda requiring active intervention from public administration instruments. This study aims to analyze the role of public administration in supporting sustainable regional development

in Toili District, Banggai Regency, an area with dual characteristics as a food granary (agriculture) and a potential extractive industry area. This study uses a descriptive qualitative approach with data collection through literature studies, observation, and policy document analysis. The theory used focuses on New Public Service (NPS) and Collaborative Governance. The results indicate that public administration in Toili District plays a crucial role in three main aspects: (1) regulation and spatial planning that balance the protection of sustainable agricultural land with economic expansion, (2) public services that empower local farming communities, and (3) facilitating collaboration among local government, the private sector, and the community. However, institutional capacity at the district level and overlapping policies at higher levels remain major challenges. It is concluded that strengthening local governance capacity and synergy among stakeholders are highly necessary to achieve the Sustainable Development Goals (SDGs) at the grassroots level.

Keywords: Public Administration, Sustainable Development, Collaborative Governance, Toili District.

Pendahuluan

Pembangunan daerah pada era kontemporer tidak lagi dapat dipandang sekadar sebagai upaya memacu pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) semata. Paradigma global telah bergeser menuju Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang mensyaratkan adanya keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan ekologi (lingkungan hidup). Dalam konteks desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia, pemerintah daerah memiliki kewenangan luas untuk mengelola sumber daya lokal, sehingga peran administrasi publik menjadi ujung tombak dalam menerjemahkan visi pembangunan berkelanjutan menjadi program dan tindakan nyata di lapangan.

Kecamatan Toili, yang terletak di Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, merepresentasikan sebuah lanskap pembangunan yang dinamis dan kompleks. Secara historis dan empiris, Toili dikenal sebagai salah satu lumbung pangan utama bagi Kabupaten Banggai dan kawasan timur Sulawesi. Potensi sektor pertanian, khususnya tanaman pangan (padi sawah), menjadi tulang punggung ekonomi sebagian besar masyarakat. Di sisi lain, Kabupaten Banggai juga merupakan area yang kaya akan sumber daya alam, termasuk sektor pertambangan dan energi (migas). Interaksi antara sektor agraris dan geliat industrialisasi menciptakan tantangan tersendiri bagi tata kelola pemerintahan lokal.

Administrasi publik hadir bukan hanya sebagai pelaksana fungsi administratif, melainkan sebagai fasilitator dan katalisator pembangunan. Konsep *New Public Service* (NPS) yang digagas oleh Denhardt & Denhardt (2025) menekankan bahwa pemerintah harus melayani warga negara, bukan pelanggan, dan mengutamakan kepentingan publik di atas segalanya. Dalam konteks Kecamatan Toili, kepentingan publik ini bermanifestasi pada kebutuhan akan perlindungan lahan pertanian dari konversi massal, penyediaan infrastruktur dasar yang ramah lingkungan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal agar tidak terpinggirkan oleh laju investasi skala besar.

Namun, mewujudkan pembangunan berkelanjutan tidaklah mudah. Kapasitas institusional di tingkat kecamatan seringkali dihadapkan pada keterbatasan anggaran, sumber daya manusia (SDM) aparatur, serta kewenangan yang masih tersentralisasi di tingkat kabupaten atau provinsi. Selain itu, dinamika sosial akibat migrasi dan perubahan mata pencaharian menuntut adanya respon kebijakan yang cepat dan adaptif.

Oleh karena itu, penelitian ini dirancang untuk mengkaji secara mendalam bagaimana peran administrasi publik (pemerintah daerah tingkat kecamatan hingga kabupaten) dalam mengelola dan mendukung pembangunan berkelanjutan di Kecamatan Toili. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan dan hambatan serta memberikan rekomendasi kebijakan bagi penguatan tata kelola kolaboratif di wilayah tersebut.

Perkembangan keilmuan administrasi publik telah melewati beberapa fase, dari *Old Public Administration* (OPA), *New Public Management* (NPM), hingga *New Public Service* (NPS) dan *Public Value Management* (Moore, 1995; Osborne, 2022). Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, paradigma NPS dan *Collaborative Governance* (Ansell & Gash, 2008; Emerson et al., 2022) dipandang paling relevan. Ansell dan Gash mendefinisikan *collaborative governance* sebagai pengaturan di mana satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan pemangku kepentingan non-negara dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang formal, berorientasi konsensus, dan deliberatif.

1.1 Pembangunan Daerah Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri (Brundtland Report, 2023). Elkington (2024) mengoperasionalkan konsep ini ke dalam *Triple Bottom Line* (TBL): *Profit* (ekonomi), *People* (sosial), dan *Planet* (lingkungan). Dalam konteks pembangunan wilayah menurut Korten (dalam Tjokroamidjojo, 2024), pembangunan haruslah berpusat pada manusia (*people-centered development*) dan menjaga kelestarian ekosistem lokal.

1.2 Kebijakan Publik Berbasis Lingkungan

Dalam literatur terbaru, integrasi antara administrasi publik dan lingkungan memunculkan konsep *Green Public Administration* (Fiorino, 2022). Konsep ini menuntut agar struktur birokrasi, regulasi tata ruang, dan kebijakan investasi didesain dengan memasukkan instrumen analisis dampak lingkungan (AMDAL) yang ketat serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) (Supriatna, 2022).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis (Creswell & Poth, 2022). Pendekatan ini dipilih untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan, khususnya terkait tata kelola pemerintahan lokal. Fokus lokasi penelitian adalah di wilayah administratif Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai.

Pengumpulan data bersumber dari data sekunder. Data sekunder diperoleh dari telaah literatur (*literature review*), dokumen perencanaan daerah seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai, dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), serta publikasi statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Banggai. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldana (2024) yang meliputi kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

1. Kapasitas Institusional dan Regulasi Tata Ruang

Sebagai lumbung pangan di Kabupaten Banggai, Kecamatan Toili memiliki area persawahan yang luas dan sistem irigasi yang mendukung. Peran administrasi publik tingkat daerah sangat krusial dalam merancang regulasi tata ruang yang melindungi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Berdasarkan analisis, pemerintah daerah telah berupaya menetapkan batas-batas zonasi antara kawasan budidaya pertanian dengan kawasan industri maupun permukiman. Namun, implementasi pengawasan (*monitoring*) di lapangan masih menghadapi kendala.

Fenomena ekspansi modal di sektor-sektor non-pertanian memberikan tekanan pada konversi lahan. Di sinilah letak ujian bagi administrasi publik: mampukah birokrasi lokal menahan godaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) jangka pendek demi ketahanan pangan dan keberlanjutan ekologi jangka panjang. Konsep tata kelola lingkungan (*environmental governance*) menekankan bahwa perlindungan lahan bukanlah tindakan anti-investasi, melainkan strategi menjaga daya dukung lingkungan wilayah.

2. Pemberdayaan Masyarakat dan Layanan Publik

Pembangunan sosial dalam kerangka SDGs mengharuskan agar "tidak ada yang tertinggal" (*leave no one behind*). Di Kecamatan Toili, mayoritas masyarakat menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Oleh karena itu, layanan publik harus difokuskan pada pemberdayaan petani. Administrasi publik berperan melalui fungsi fasilitasi penyuluhan pertanian, distribusi pupuk bersubsidi yang tepat sasaran, dan bantuan alat mesin pertanian (alsintan).

Selain itu, untuk menaikkan nilai tambah produk pertanian lokal, dibutuhkan program dari dinas terkait untuk melatih masyarakat mengenai pengolahan pasca-panen. Sayangnya, koordinasi lintas sektoral antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Dinas Pertanian, Dinas Koperasi dan UKM, serta Dinas Perdagangan di tingkat kabupaten kadang kala mengalami kebuntuan (*silo effect*). Pemerintah Kecamatan dalam hal ini sering bertindak sebagai integrator program di tingkat tapak, meski kewenangannya dibatasi oleh regulasi sektoral.

a. Sinergi dan Kolaborasi Antar-Stakeholder

Penerapan teori *Collaborative Governance* menemukan relevansinya di Toili. Mengingat keberadaan perusahaan-perusahaan besar (misalnya di sektor energi yang beroperasi di wilayah Banggai secara umum), kolaborasi dengan sektor swasta melalui

instrumen *Corporate Social Responsibility* (CSR) menjadi keharusan. Administrasi publik dituntut untuk berperan sebagai "konduktor" yang mengarahkan dana CSR agar selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan kebutuhan riil warga Toili, bukan sekadar *charity* atau filantropi kosmetik.

Terdapat inisiatif forum musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang mengikutsertakan perwakilan perusahaan, tokoh adat, kelompok tani, dan akademisi. Forum deliberatif ini, jika dikelola secara transparan dan akuntabel, dapat meredam potensi konflik agraria maupun sosial antara warga lokal dengan kepentingan investasi eksternal.

b. Tantangan Administrasi Publik Lokal

Penelitian ini juga mengidentifikasi tiga tantangan utama. Pertama, keterbatasan kapasitas birokrasi lokal dalam merespons cepat dinamika perubahan iklim yang memengaruhi siklus tanam di Toili. Kedua, adanya tumpang tindih perizinan akibat transisi regulasi (misalnya efek dari UU Cipta Kerja terhadap otonomi perizinan daerah). Ketiga, masih kurangnya literasi digital birokrasi dalam pemanfaatan teknologi (*e-government*) untuk memantau data pembangunan desa presisi di seluruh wilayah kecamatan.

Kesimpulan

Administrasi publik memiliki peran yang sangat determinan dalam menjamin tercapainya pembangunan daerah berkelanjutan di Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai. Peran tersebut dieksekusi melalui regulasi penataan ruang yang melindungi lahan pangan produktif, pemberdayaan ekonomi masyarakat tani, serta penguatan tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*) dengan sektor swasta dan elemen *civil society*.

Agar peran ini lebih efektif, direkomendasikan agar Pemerintah Kabupaten Banggai memberikan penguatan kapasitas kewenangan dan anggaran kepada Pemerintah Kecamatan Toili sebagai ujung tombak pelaksana di lapangan. Selain itu, platform kolaborasi lintas aktor harus dilembagakan secara formal guna memastikan transparansi, sinkronisasi program pembangunan, dan resolusi konflik lahan. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Toili berarti merawat lumbung pangan sekaligus menyejahterakan masyarakatnya tanpa mengorbankan kelestarian ekosistem masa depan.

Bibliografi

- Ansell, C., & Gash, A. (2022). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543-571.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2022). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2025). *The New Public Service: Serving, Not Steering* (4th ed.). Routledge.

- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2022). An Integrative Framework for Collaborative Governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1-29.
- Fiorino, D. J. (2022). Sustainability as a Conceptual Focus for Public Administration. *Public Administration Review*, 70(s1), s78-s88.
- Kementerian PPN/Bappenas. (2020). *Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)*. Jakarta: Bappenas.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2024). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. SAGE Publications.
- Osborne, S. P. (2022). Public Service Logic: Creating Value for Public Service Users, Citizens, and Society Through Public Service Delivery. *Routledge*.
- Supriatna, J. (2022). *Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Tjokroamidjojo, B. (2024). *Pengantar Administrasi Pembangunan (Edisi Revisi)*. Jakarta: LP3ES.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.